

Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Kota Pekanbaru

Nurmasari¹, Eka Komalasari²

nurmasari@soc.uir.ac.id¹, eka.komalasari@soc.uir.ac.id²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Abstract :

Micro, Small, and Medium Enterprises are one of the pillars and drivers of the economy. This can be seen from the significant small business activities from both the traditional and modern sectors. This activity is one of the absorbers of labor and is the main pillar of economic growth in the development of a country. Problems in this activity are human resources who do not understand technology, limited marketing, technology is beyond the reach of business actors, and also does not allow investment in new technology. This study aims to analyze the role of the government in fostering small and medium enterprises to face the 4.0 industrial revolution in Pekanbaru city and to find out the government's obstacles in fostering small and medium enterprises facing the 4.0 industrial revolution in Pekanbaru city. The method used in this research is descriptive qualitative, collecting data by means of interviews, observations, and documentation with Small and Medium Enterprises and the Office of Cooperatives for Micro, Small, and Medium Enterprises. The results of the study indicate that the Government's Role in Fostering Small and Medium Enterprises to Face the Industrial Revolution 4.0 in Pekanbaru City seen from the indicators of facilitators, regulators, and catalysts can be concluded that it has been carried out quite well. There were several obstacles encountered, namely the lack of budget from the Regional Revenue and Expenditure Budget, the low mindset of Small and Medium Enterprises actors, and the lack of information received related to the guidance carried out.

Keywords: *Coaching, Small and Medium Enterprises, Technology Capability*

Abstrak:

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu penopang dan penggerak roda perekonomian. Hal ini dilihat dari kegiatan usaha kecil yang signifikan baik dari sector traditional maupun modern. Kegiatan ini sebagai salah satu penyerap tenaga kerja dan kontributor dan tiang utama pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan suatu negara. Masalah dalam kegiatan ini yaitu sumber daya manusia yang kurang memahami akan teknologi, pemasaran yang terbatas, teknologi diluar jangkauan pelaku usaha, dan juga tidak memungkinkannya investasi teknologi yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah serta pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Pembinaan

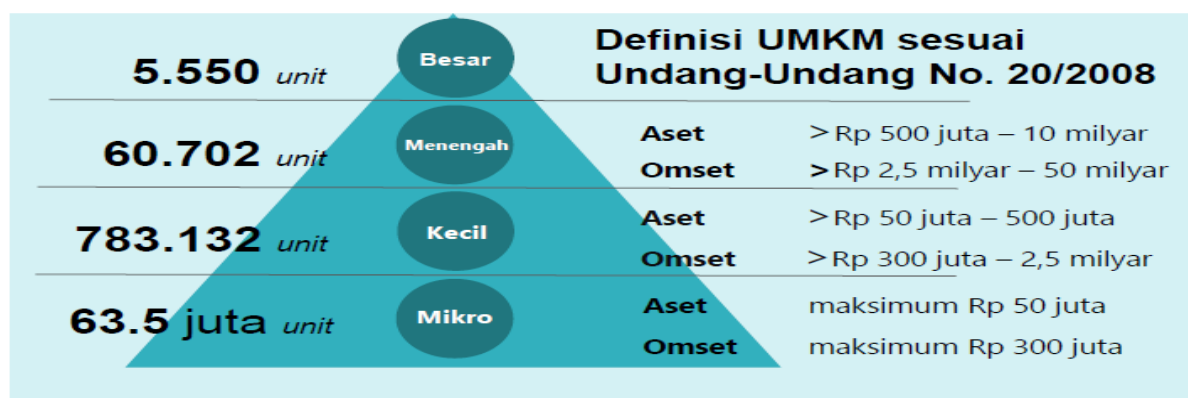
Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pekanbaru dilihat dari indikator fasilitator, regulator dan katalisator dapat disimpulkan telah dilakukan dengan cukup baik. Terdapat beberapa hambatan yang di temui yaitu kurangnya anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rendahnya mindset pelaku Usaha Kecil Menengah, dan kurangnya informasi yang di terima terkait pembinaan yang dilakukan.

Kata Kunci: *Pembinaan, Usaha Kecil Menengah, Kemampuan Teknologi.*

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang dan penggerak roda perekonomian. Hal ini dilihat dari kegiatan usaha kecil yang signifikan baik dari sector traditional maupun modern. UMKM menjadi kuat karena keberadaannya tersebar di seluruh penjuru negeri serta UMKM memiliki beberapa keunggulan di beberapa faktor yakni kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan inovasi. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alhawariy, 2021; Sarosa & Samiaji, 2012; Wulansari, Hakim, & Ramdani, 2021) menemukan fakta bahwa Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu penyerap tenaga kerja dan kontributor dan tiang utama pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan suatu negara.

Defenisi UMKM berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (Yazfinedi, 2018) di lihat dari kuantitas tenaga kerja, dengan kriteria sebagai berikut: Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang, usaha menengah yaitu usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 - 99 orang. Untuk lebih rincinya dalam pembagian UMKM dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1 : Struktur Usaha di Indonesia (Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM, 2018)

Berdasarkan gambar 1, dapat kita lihat jumlah struktur usaha di Indonesia yang terbagi menjadi 4 bagian struktur usaha yaitu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar. Maka bisa kita lihat bahwa jumlah struktur usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia jumlahnya lebih dominan dibandingkan usaha besar, oleh sebab itu perlu perhatian khusus dari Pemerintah supaya bisa meningkatkan posisi usaha mikro kecil dan menengah menjadi posisi usaha besar serta bisa menghadapi persaingan di era Revolusi Industri 4.0.

Perkembangan Industri 4.0 secara global berdampak di Indonesia, Kementerian Perindustrian meluncurkan strategi Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki Industri 4.0 agar Indonesia dapat berdaya saing dengan negara lainnya (Indonesia, 2008). Salah satu strategi prioritas nasional Making Indonesia 4.0 merupakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sari & Santoso, 2019)

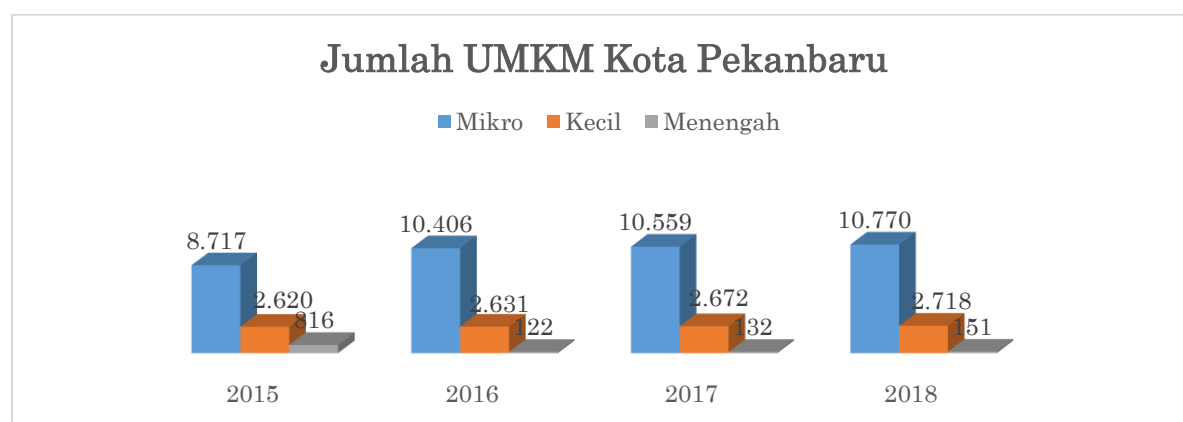
Perkembangan bisnis UKM di kota Pekanbaru sudah cukup baik. Namun dalam proses pengelolaan usaha, pihak UKM sebagian menggunakan metode yang masih bersifat tradisional, sehingga penggunaan teknologi masih sangat minim, belum modern seperti penggunaan Teknologi Informasi yang sesuai dengan perkembangan revolusi industry 4.0. Penggunaan teknologi tidak menjadi prioritas bagi para pelaku UKM, oleh sebab itu perlu di lakukan pembinaan seperti pelatihan teknologi modern yang sesuai dalam menghadapi revolusi industri 4.0 untuk mengoptimalkan produksinya (Efendi, 2003; Fathoni, 2006; Gomes, 2003; Hasibuan, 2012; Kasmir, 2016; Siagian, 2001).

Adapun yang menjadi kendala pihak UKM dalam mengaplikasikan teknologi informasi dalam menghadapi revolusi industry 4.0 disebabkan oleh tidak memilikinya SDM yang paham akan teknologi, pemasaran produk yang terbatas, teknologi diluar jangkauan pihak UKM, dan juga tidak memungkinkannya investasi teknologi yang baru (Endang Swastuti & Pudjiarti, 2021; Eta Sawitri, Hidayat, & Ajizah, 2021). Disinilah salah satu peran Pemerintah yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan kepada pihak pelaku UKM agar dapat meningkatkan

potensi usahanya agar siap menghadapi era revolusi industri 4.0 (Peraturan Menteri Koperasi, 2020).

Selain adanya peran pemerintah yaitu pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, pengembangan UKM dalam memasuki era revolusi industri 4.0 juga diperlukan sebuah kesiapan dari pelaku UKM itu sendiri. Persyaratan penting dalam mengikuti perkembangan pasar dalam menerapkan teknologi informasi merupakan bagian dari kesiapan pelaku UKM untuk mengadopsi inovasi baru dan berperan penting pada dunia bisnis dan industri. Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan (Sari & Santoso, 2019), kesiapan suatu usaha dalam suatu negara dengan cara terintegrasi untuk mengadopsi, menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat dikembangkan untuk merasionalisasikan tindakan, meningkatkan daya saing, dan mengelola sumber daya secara efisien (Nurmasari & Hafis, 2019; Widayani & Yuniarti, 2021).

Berikut ini dapat kita lihat perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru (Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 2021)

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa peningkatan significant terjadi pada jumlah usaha mikro pada tahun 2018 yaitu sebesar 58,83%, sedangkan untuk usaha kecil mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 46,43% namun mengalami penurunan pada tahun 2018. Untuk usaha menengah tidak mengalami peningkatan apapun. Hal ini memiliki indikasi bahwa UMKM di kota Pekanbaru perjalanan usahanya masih belum berkembang dengan baik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan guna memperoleh data dan informasi yang mendalam (Afifuddin & Beni, 2012; Nurdin & Hartati, 2019; Soerjono., 2006; Sugiyono, 2013) mengenai Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pekanbaru. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana dan Pelaku Usaha Kecil Menengah yang ada di Kota Pekanbaru, dari hasil wawancara tersebut di Analisis menggunakan teori peran dengan tiga indikator Fasilitator, Regulator, dan Katalisator.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat dianalisis dengan adanya indikator yang ada pada teori peran menurut (Auliya & Arif, 2021; Diva, 2009; Nirwana, Muhammadiyah, & Hasanuddin, 2017) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal dapat diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM. Apabila UKM memiliki kelemahan dibidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan kepada pelaku usaha dengan cara, seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru yaitu memberikan pelatihan-pelatihan dua kali dalam setahun dan di bagi menjadi dua angkatan, dan apabila UKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UKM mampu mendapatkan pendanaan

yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UKM menjadi tidak tergantung (Diva, 2009).

Menurut (Widjaja, 2002) pembinaan merupakan proses dalam berkembang yang melalui urutan-urutan seperti menumbuhkan dan memelihara pertumbuhan tersebut disertai dengan usaha memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan. Dengan pembinaan inilah salah satu usaha Dinas untuk mengembangkan UKM yang ada di kota pekanbaru sehingga siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0 mampu bersaing dan produk UKM dapat dipasarkan sampai ke mancanegara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. H.Idrus, S.Ag, M.Ag, Sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru : Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru telah menjalankan peran sebagai fasilitator dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Bahwa pihak dinas telah melakukan pembinaan kepada pelaku UKM dalam bentuk memberikan pelatihan-pelatihan dan menyampaikan kepada pelaku UKM yang ada di kota pekanbaru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas sehingga dengan mengikuti pelatihan tersebut UKM dapat menambah wawasan.

Tabel 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan pada Tahun 2020

No	Bentuk Pelatihan	Angkatan 1	Angkatan 2
1.	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan	90	90
2.	Pelatihan Manajemen Usaha	90	90

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru, 2021.



Gambar 3. Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah. (Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru, 2021).

Berdasarkan wawancara dari sepuluh pelaku UKM, responden mengatakan mereka diundang dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas serta dokumentasi yang dilakukan serta dikuatkan dengan pandangan (Ndraha, 2001, 2013) bahwa pemerintah mempunyai peran sebagai regulator dari berbagai program maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah telah berperan dengan baik dalam melakukan pembinaan kepada pelaku UKM dalam bentuk pelatihan – pelatihan yang telah di selenggarakan. Pelatihan yang diselenggarakan membantu para pelaku UKM mengaplikasikan teknologi dengan memasarkan produk UKM nya secara online melalui media sosial agar mampu bersaing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

2. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah pembuat kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan UKM, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah usaha UKM agar mampu tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang di bagi menjadi dua yaitu: wewenang pemerintah pusat

dan wewenang pemerintah daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

Adanya Regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam (Harefa, 2016) bahwa fungsi utama dari regulasi adalah untuk melindungi dan memberikan manfaat masyarakat atau kelompok tertentu. Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Sehingga paling tidak, ada dua tujuan; yaitu untuk tujuan administratif dan pengaturan; serta tujuan yang berkaitan dengan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hamsani Rahman, SE.MP sebagai Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Beliau menyampaikan bahwa : “Pemerintah telah menjalankan perannya sebagai regulator dengan membuat kebijakan dalam bentuk program pembinaan untuk membantu para pelaku UKM lebih mudah untuk mengembangkan usaha mereka”. Dan juga mewawancarai Bapak Faizal Zubir, ST. M.Si sebagai Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana mengatakan bahwa : “Dinas sudah melakukan perannya sebagai regulator dengan membuat program-program untuk kemajuan usaha UKM, melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Mendatangi tempat-tempat usaha kecil menengah dan melakukan diskusi ringan berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh UKM agar usahanya berkembang”.

Hasil wawancara diatas, dikuatkan dengan pandangan (Ndraha, 2001, 2013) bahwa pemerintah mempunyai peran sebagai regulator dari berbagai program. Berdasarkan wawancara dengan pelaku UKM, serta penguatan pandangan dari ahli terkait hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinas cukup berperan sebagai regulator sehingga para pelaku usaha merasa diperhatikan dan memiliki tempat untuk berkonsultasi dengan adanya

kebijakan-kebijakan pemerintah yang membantu para pelaku UKM untuk memajukan usahanya.

3. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Berdasarkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru peran pemerintah sebagai katalisator pengembangan UKM adalah mempercepat proses pengembangannya UKM menjadi *fast moving enterprise* yang artinya UKM yang kental akan jiwa kewirausahaan dan segera untuk menjadi usaha besar. Adapun keterlibatan pemerintah dalam keseluruhan proses perubahan tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah hendaklah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UKM, prasarana intelektual bagi UKM (HAKI) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir (Diva, 2009)

Peran pemerintah sebagai katalisator lebih cenderung kepada penyampaian informasi secara komprehensif kepada pelaku usaha. Seperti adanya informasi bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. H.Idrus, S.Ag, M.Ag, Beliau menyampaikan “Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru telah menjalankan peran sebagai katalisator dengan cara melakukan pendataan pelaku usaha yang ada di kota pekanbaru. Berdasarkan pendataan yang kami lakukan ada 12 ribu pelaku UKM mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian koperasi dan UKM, bantuan langsung disalurkan ke masing-masing rekening pelaku UKM. Untuk ditahun 2020 UKM mendapat bantuan Rp 2.400.000 tetapi untuk bantuan di tahun 2021 sebesar Rp 1.200.000; bantuan yang diberikan sangat membantu untuk perkembangan usaha mereka.

Hasil wawancara dengan Bapak Hamsani Rahman, SE.MP. Beliau menyampaikan hal yang sama dimana “Pemerintah telah menjalankan perannya yaitu dalam bentuk memberikan bantuan – bantuan sebagai stimulus bagi para pelaku usaha agar lebih semangat untuk mengembangkan usahanya”.

Pandangan informan diatas, dikuatkan dengan teori yang disampaikan oleh (Ndraha, 2001, 2013) bahwa pemerintah mempunyai peran sebagai regulator dari berbagai program. Dari wawancara beberapa pelaku UKM serta penguatan teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas telah berperan cukup baik dalam mendata dan memberikan informasi dan memberikan arahan kepada pelaku UKM sehingga para pelaku UKM mendapatkan bantuan dalam pengembangan usahanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : indikator pertama peran sudah dijalankan dengan baik, bisa dilihat dari kegiatan pembinaan dalam bentuk pelatihan – pelatihan yang telah dilakukan oleh dinas untuk menambah wawasan dan keterampilan para pelaku usaha untuk mengaplikasikan teknologi dengan memasarkan produk UKM nya secara online dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk indikator kedua disimpulkan cukup berperan dikarenakan beberapa program yang dibuat ini ada yang terkendala untuk dijalankan dikarenakan kurangnya anggaran yang ada. Dalam program kerja ini memang 60% itu lebih terfokus pada pembinaan bagi pelaku UKM, Dengan bergairahnya UKM maka ekonomi kerakyatan pun ikut tumbuh. Indikator ketiga peran cukup berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari pemerintah untuk pengembangan usaha para pelaku UKM berbentuk uang yang ditransfer ke rekening masing-masing pelaku UKM, tetapi ada juga pelaku UKM yang tidak mendapatkan bantuan ini dikarenakan kurang informasi yang didapat dan syarat yang tidak dipenuhi. Faktor penghambat dalam penelitian ini; 1) Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang telah direncanakan. 2) Mindset pelaku UKM tersebut yang hanya mengarpakan bantuan dari dinas. 3) Pelaku usaha kurang mendapatkan informasi terkait kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas. Adapun saran yang diberikan seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru menambahkan APBD khusus untuk program pembinaan bagi pelaku UKM, dan Dinas sebaiknya lebih banyak memberikan pembinaan yang mengarah ke revolusi industri 4.0

agar pelaku UKM yang ada di kota pekanbaru tidak ketinggalan dibandingkan dengan UKM yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Afifuddin, & Beni, S. A. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alhawariy, S. (2021). Implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di disnakerperinkopukm kabupaten kudas. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1).
- Auliya, A. N., & Arif, L. (2021). Peran dinas koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan dalam penanganan dampak pandemi covid-19 pada usaha mikro di kabupaten gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 10.
- Diva, G. (2009). *Mengembangkan umkm melalui pemberdayaan peran pemerintah daerah*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Efendi, M. (2003). *Pembinaan ekonomi dan budaya indonesi*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Endang Swastuti, & Pudjiarti, E. S. (2021). Strategi pengembangan ekonomi kreatif mendukung daya saing daerah kota tangerang. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1).
- Eta Sawitri, Hidayat, R., & Ajizah, D. N. (2021). Evaluasi program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (uppks) desa tambaksari, tirtajaya, karawang. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1).
- Fathoni, A. (2006). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gomes, C. F. (2003). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Andi Offset.
- Harefa, M. (2016). Penguatan ekonomi domestik. *December, VIII(I/P3DI)*.
- Hasibuan, M. H. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*, . Jakarta: Bumi Aksara.
- Usaha mikro, kecil dan menengah untuk memberikan fasilitas, bimbingan, pembinaan dan sebagainya, 20 C.F.R. (2008).
- Kasmir. (2016). *Manajemen sumber daya manusia (teori dan paktik)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Koperasi dan UKM. Struktur Usaha di Indonesia 2018. Diakses dari: <https://oneshildt.com/2020/11/27/perlukah-umkm-berbadan-usaha/>

- Ndraha, T. (2001). *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, T. (2013). *Pengantar teori pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, & Hasanuddin, M. (2017). Peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di kabupaten enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 14.
- Nuridin, & Hartati. (2019). *Metode penelitian sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Nurmasari, & Hafis, R. I. A. (2019). Desentralisasi asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 13.
- Pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi., 6 C.F.R. (2020).
- Sari, R. P., & Santoso, D. T. (2019). Pengembangan model kesiapan umkm di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Media Teknik & Sistem Industri*, 3(1), 6.
- Sarosa, & Samiaji. (2012). Adoption of social media networks by indonesian sme: A case study. *Procedia Economics and Finance*, 4, 244-254. doi:10.1016/s2212-5671(12)00339-5
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono., S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r & d*. Bandung: Alfabeta.
- Widayani, A., & Yuniarti, D. A. F. (2021). Kesiapan industri kecil dan menengah dalam menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 8(2), 10.
- Widjaja, A. W. (2002). *Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wulansari, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Strategi dinas koperasi dan umkm kabupaten karawang dalam pemberdayaan umkm. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1).
- Yazfinedi. (2018). Usaha mikro, kecil, dan menengah di indonesia: permasalahan dan solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV, 33-41.